



OTT Pembuang Sampah Pakai Drone Disebut Pemborosan

▶ Digelar Dua Minggu Sekali

Gambir, Warta Kota

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, mengkritisi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan drone dalam upaya operasi tangkap tangan (OTT) pembuang sampah tidak efektif.

Jebolan Universitas Trisakti itu menilai langkah tersebut kurang efektif, karena di DKI sudah banyak terpasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) yang belum dioptimalkan untuk penegakan peraturan daerah.

"Pembelian drone ini jadinya tidak efektif. Pemborosan, buang-buang anggaran. Karena menurut saya, dengan CCTV yang ada saja sudah cukup, tinggal mengoptimalkan penegakan hukumnya, penegakan Perda terkait pengelolaan sampah itu," kata Trubus pada Senin (7/11/2022).

Menurut dia, keberadaan CCTV ini baru dioptimalkan manfaatnya untuk pencegahan kriminal dan pelanggaran lain yang berhubungan dengan kepolisian.

Karena itu, dia menganggap Pemerintah DKI belum bersungguh-sungguh menindaklanjuti laporan masyarakat atas oknum warga yang membuang sampah sembarangan.

"Menurut saya, persoalan utamanya Satpol PP tidak punya nyali untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas pelanggaran pembuangan sampah yang seenaknya itu. Padahal itu sudah ada perdanya, tinggal Satpol PP menegakkan Perda itu dengan baik," ucap Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini.

Dia menambahkan, penggunaan drone untuk OTT pembuang sampah tidak ada urgensinya sama sekali. Kata dia, drone hanya berfungsi untuk merekam wajah pelaku yang sama persis seperti CCTV.

"Saya kira, masyarakat Jakarta sudah punya kesadaran yang tinggi, sudah teredukasi dengan baik. Buktinya, banyak masyarakat yang turut melaporkan oknum warga yang masih ngeyel membuang sampah sembarangan. Nah, ini tinggal bagaimana penegakkannya saja," imbuhnya.

Pembelian drone ini jadinya tidak efektif. Pemborosan, buang-buang anggaran. Karena menurut saya, dengan CCTV yang ada saja sudah cukup, tinggal mengoptimalkan penegakan hukumnya...

Besaran Denda

Sementara itu Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan denda yang terkumpul akan disetorkan ke khas daerah.

"Itu nanti dianggap sejenis retribusi. Jadi enggak dipegang petugas, dimasukkan ke khas daerah," katanya saat dihubungi, pada Senin (7/11/2022).

Ia menjelaskan untuk besaran denda tergantung dari diskresi petugas pengawas.

Apabila usianya masih anak-anak, akan diberi denda yang agak kecil.

Kemudian Yogi memberikan, jika kondisi ekonominya sedikit sulit, maka akan diberi sanksi sosial saja.

"Jadi memang pertimbangan tersebut tergantung dari petugas di lapangan," kata Yogi.

Saat ditanya kemungkinan digelar setiap Car Free Day (CFD), Yogi mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan tiap dua minggu sekali.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menangkap 19 warga yang nekat membuang sampah saat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (6/11/2022) pagi. (faf/m36)